

PESAN MORAL RANGGAWARSITA DALAM *KALATIDHA* DAN *SERAT JAKA LODHANG*

D. Jupriono*
Linusia Marsih**

Abstract. Through Javanese lyrical poem “macapat”, Ranggawarsita delivered his social critiques toward the Solo’s royal family disgraceful behaviors in the middle of XIX century. The substance of the critiques, however, is still actual for the Indonesia in the Reformation Order since this order practices corruption, collusion, and nepotism worse. Ranggawarsita’s moral messages that are still actual up to the present are: (1) the lack of role model of leadership’s behaviors resulting in country depravity; (2) intelligence without morality causing misfortune; (3) no matter how happy the forgetful people, being happier those who are alert and still remember; sticking to the truth one to be despite his surrounding doing greedy; (4) the religious leaders and intellectuals having to be standing up for temptation.

Key words: moral message, macapat, corruption, state leaders, cultural resistance

PENDAHULUAN

Setiap manusia sudah menerima vonis hukuman mati tanpa mengetahui kapan eksekusinya dilaksanakan; sebagai makhluk terkutuk dan dalam keadaan menunggu, manusia tidak mempunyai pilihan lain kecuali berbuat baik. Nasihat fatalistik ini datang dari sastrawan dan filosof Victor Hugo (Pater, 1997: 1641). “Ketika negara dikotori korupsi, puisilah yang akan membersihkannya”. Slogan ini amat populer di berbagai kalangan, dari penyair pamflet macam Rendra dan Wiji Thukul hingga tokoh kaliber jagad. Dengan keyakinan itulah, misalnya, Presiden USA John F. Kennedy sering mengutip Longfellow dan John Greenleaf Whittier, idealis Soe Hok Gie membaca Walt Whitman dan Chairil (Kleden, 2000), serta Bung Karno sering menyitir puisi-puisi tembang dari *Kalatidha*-nya Ranggawarsita.

Kenyataan ini menyiratkan optimisme bahwa sastra menyimpan nilai-nilai kehidupan yang dapat mempengaruhi kehidupan suatu bangsa. Setidaknya, menurut Goenawan Mohamad (1996: 307), puisi adalah salah satu bentuk ekspresi *pasemon* (sindiran). Sebagai sindiran, puisi mencerminkan kepekaan penyairnya. Memang, sastrawan (dan seniman lainnya), menurut Mochtar Lubis (1992), adalah anggota masyarakat yang paling peka pada masyarakat dan lingkungan sekelilingnya (cf. Toer, 2002).

Di dalam sastra terdapat nilai-nilai luhur sebagai pencerahan kehidupan. Tak terkecuali bagi masyarakat Jawa, sastra telah diakui oleh para sosiolog sebagai sumber informasi mengenai tingkah laku, nilai-nilai, dan cita-cita khas keluarga, masyarakat, dan generasi (Ras, 1985; Amir, 1997; Brakel-Papenhuyzen, 2004). Di kalangan tertentu, tidak sedikit yang meyakini bahwa sastra sanggup menjalankan perannya sebagai kontrol terhadap ketimpangan dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Apa pun kata orang, karya sastra memang menyimpan pesan moral (Richards, 1993; Danziger & Johnson, 1997) yang tidak hanya dapat dirasakan, tetapi, lebih dari itu, juga sanggup

* Drs. D. Jupriono, M. Si., peneliti pada Pusat Penelitian Sastra dan Strategi Kebudayaan (PPSSK), Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

** Linusia Marsih, S. S., M.Pd., dosen Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

mengerakkan, maksimal di tingkat massa dan minimal di tingkat pribadi (Tamba, 2002; Sarjono, 2003; Maier, 2004).

Tulisan ini merupakan sebetulnya apresiasi terhadap puisi-puisi satire sosial karya pujangga terakhir sastra Jawa dari Keraton Surakarta, R.Ng. Ranggawarsita, lebih dari seratus tahun silam. Akan ditunjukkan dalam tulisan ini bahwa dalam puisi-puisi tersebut terdapat pesan sosial yang hingga di Era Reformasi kurun 2011 ini terasa tetap aktual. Pesan moral yang dipancarkan tetap sesuai untuk introspeksi dan retrospeksi pencerahan diri bagi para pejabat dan politisi. Pancaran nilai moral sosialnya juga patut didudukkan sebagai media pembangkit kewaspadaan bahwa *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*, seperti kata Lord Acton. Ada dua pernyataan yang hendak dikupas, yaitu: (1) Bagaimanakah kesaksian Sang Pujangga tentang tercelanya perilaku para pemimpin dan penguasa?; (2) Pesan moral apa sajakah yang disuarakan Ranggawarsita dalam mengkritik kebobrokan zaman?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini peneliti hendak mendeskripsikan pesan moral dalam *Kalatidha* dan *Serat Jaka Lodhang*. Dalam melakukan penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang menjadi alat pengumpul data dan dengan kesensitifannya melakukan klasifikasi dan menganalisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan proses berfikir induktif yang lebih mementingkan makna daripada hasil. Dengan demikian pendekatan penelitian ini adalah kualitatif mengingat: peneliti sebagai instrumen kunci; penelitian dilakukan secara deskriptif; lebih mengutamakan proses daripada hasil; analisis data dilakukan secara induktif; dan makna sebagai andalan utama (Endraswara 2003:5).

Sumber data dalam penelitian ini adalah *Kalatidha* dan *Serat Jaka Lodhang* karya Ranggawarsita. Data dalam penelitian ini berupa teks (yang berupa kata, frasa, atau kalimat) yang mengindikasikan bentuk-bentuk penyimpangan moral pada pertengahan abad XIX. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode pencatatan. Pada tahap ini penulis mengidentifikasi dan mencatat data yang mengindikasikan pesan moral yang terdapat dalam kedua kumpulan puisi tersebut.

Dalam melakukan analisis data, penulis melakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut. Pertama, data mengenai pesan yang telah dikumpulkan dari dua kumpulan puisi dipilah-pilah dan diklasifikasikan berdasarkan aspek yang akan diteliti. Kedua, peneliti mengklasifikasi data mengenai pesan moral. Ketiga, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisis berdasarkan: (a) kesaksian Sang Pujangga tentang tercelanya perilaku para pemimpin dan penguasa; (b) pesan moral yang disuarakan Ranggawarsita dalam mengkritik kebobrokan zaman.

TEMBANG MOCOPAT SEBAGAI MEDIA RESISTENSI KULTURAL

Perilaku tercela para politisi dan pejabat (*nayakaning praja*) sudah marak di kurun awal abad XIX, bahkan embrionya sudah dibangun sejak VOC, sekitar 1600-an. VOC-lah pihak pertama yang layak dituduh sebagai biang kerok perdana soal KKN di Nusantara. Meskipun begitu, maraknya korupsi bukan karena kepintaran pelaku semata, melainkan karena *kawulo* (rakyat jelata) “merestui” korupsi para pejabat dengan cara membiarkannya, apatis, dan *cuek* terhadap apa pun yang bersentuhan dengan kekuasaan dan penguasa keraton. Dalam perspektif gramscian, rakyat saat itu berada dalam genggamannya hegemoni penguasa keraton.

Perilaku tercela *bancakan* duit keraton (dipungut dari rakyat!), tentu saja, sudah marak di kerajaan mana pun, misalnya Keraton Surakarta kurun paroh abad XIX—paling tidak seperti kesaksian pujangga terakhir sastra Jawa, R.Ng. Ranggawarsita (1802—1873). Sepanjang hayatnya, Ranggawarsita mengabdikan kepada enam raja: Paku Buwono IV (1788—1820), Paku Buwono V (1820—1823), Paku Buwono VI (1823—1830), Paku Buwono VII (1830—1850), Paku Buwono VIII (1850—1862), dan Paku Buwono IX (1862—1893). Sebagian besar kesaksian atas kebobrokan zamannya dituliskannya dalam bait-bait tembang *Serat Kalatida* (Kamajaya, 1985) dan *Jaka Lodhang* (Ranggawarsita, 2000; 2001). Sebagai seorang pujangga, Ranggawarsita cukup produktif. Di samping kedua kitab tersebut, masih banyak karya lain, misalnya *Jayengbaya*, *Pustakaraja Purwa*, *Cemporet*, *Sabdajati*, *Sabdatama*, *Paramayoga*, *Wedharaga*, *Serat Wirid*, *Wirid Hidayat Jati*, *Sesaji Rajasurya*, dll.

Ketika kekayaan negara dieksploitasi habis-habisan oleh para pejabat kleptokrat dan politisi koruptor, penyair menyuarakan eksploitasi tersebut melalui puisi-puisinya agar semua mengetahuinya. Karya seni (termasuk sastra, puisi) sesungguhnya selalu bernuansa politis, bahkan amat politis ketika jatuh ke tangan publik, malahan ketika jauh melampaui zamannya sekalipun. Substansi kritik tembang-tembang Ranggawarsita masih tetap aktual, apresiatif, dan berharga hingga sekarang, biarpun usianya sudah ratusan tahun lalu. Karena di dalamnya disuarakan pesan moral yang manusiawi dan universal, substansinya mampu menembus batas geografis dan demarkasi waktu (cf. Sweeney, 2004) saat bangsa Indonesia memasuki sebuah orde bernama Reformasi—suatu orde yang teramat optimis *haqulyakin* sanggup menghabisi korupsi, tetapi ironisnya korupsi malah parah menjadi-jadi.

PEMBAHASAN

Beberapa Pesan Moral Ranggawarsita

Ada beberapa pesan moral yang disuarakan Ranggawarsita melalui puisi-puisi tembangnya, yaitu: (1) tiadanya teladan perilaku pemimpin mengakibatkan rusaknya negara; (2) kepandaian tanpa moralitas akan membawa petaka; (3) sebahagia-bahagia orang yang lupa, masih lebih bahagia orang yang ingat dan waspada; siapa pun harus bertahan pada kebenaran meski sekelilingnya berbuat angkara; (4) ulama dan intelektual harus tahan dari godaan politik. Satu per satu dibentangkan dalam bagian berikut.

Tiadanya Teladan Perilaku Pemimpin Mengakibatkan Rusaknya Negara

Pesan moral pertama Ranggawarsita adalah “pemimpin yang tak mampu memberi teladan perilaku hanya akan merusak tatanan kehidupan suatu negara”. Bila dicermati, puisi tembang *sinom* pertama dalam *Serat Kalatida* (2000) merupakan kesaksian Ranggawarsita bahwa supremasi hukum yang dilecehkan, sebagai cermin telanjang tiadanya keteladanan dari para penguasa, mengakibatkan martabat Keraton Surakarta jatuh terkapar. Selengkapnya, puisi pertama itu sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Mangkya darajating praja
Kawuryan wus sunya ruri
Rurah pangrehing ukara
Karana tanpa palupi
Atilar tilastuti
Sarjana sujana kelu</p> | <p>(Sekarang martabat negara
tampak telah sunyi sepi
Rusak pelaksanaan peraturannya
karena tanpa teladan
segala aturan baik dilanggar
Para orang pandai lesu</p> |
|---|--|

Kalulun Kalatidha	terbawa arus Zaman Bimbang
Tidhem tandhaning dumadi	kehilangan tanda-tanda kehidupan
Ardayangrat dening karoban rubeda	kesengsaraan dunia tergenang aneka bencana)

Menurut Ranggawarsita dalam kutipan (1), kehormatan negara jatuh karena tidak jelasnya dan lemahnya penegakan aturan hukum (*rurah pangrehing ukara*). Supremasi hukum dilecehkan karena perilaku para pemimpin kerajaan tidak mampu memberikan suri teladan (*karana tanpa palupi*). Menghadapi suasana demikian, para intelektual kebingungan (*Kalulun Kalatidha*)—apalagi rakyat jelata. Maka, beraneka bencana dan musibah serentak mendera seluruh pelosok kerajaan.

Jika dibawa ke era kontemporer, apakah kesaksian moral Sang Pujangga ini masih aktual? Orang-orang mancanegara memandang rendah dan hina kepada bangsa Indonesia; martabat negara jatuh, sekarang. Pada zaman Bung Karno, rakyat memang miskin. Meskipun demikian, mereka masih memiliki kebanggaan sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat. Masihkah sekarang begitu? Ketika sedang di luar negeri, sekarang, pejabat dan pebisnis Indonesia sering merasa minder, malu, tak sanggup menampilkan kebanggaannya sebagai bangsa besar.

Sebagaimana besar masyarakat merasakan bahwa bangsa ini sudah tidak memiliki apa-apa yang dapat dibanggakan. Masyarakat internasional mempersepsi Indonesia sebagai bangsa melarat, goblok, utangnya “sambung-menyambung menjadi satu” (itulah Indonesia!), sadis, korup, culas, hipokrit, penipu, maling, pejabatnya suka KKN, teroris, sakit-sakitan, kelaparan, ramahnya pura-pura, sering perang saudara, pengonsumsi narkoba, ... seakan Indonesia adalah segerobak sampah busuk. Realitas empiris perilaku pejabat dan masyarakat Indonesia yang masih dapat digunakan untuk menyanggah citra buruk tersebut, apakah masih dapat ditemukan? Kejujuran itu penting, tetapi tetap pahit.

Masih sanggupkah bangsa Indonesia berbangga diri jika realitas kehidupan dan perilaku kekuasaan para pejabat saat ini memang persis 100% seperti yang dipersepsikan masyarakat mancanegara? Perilaku pejabat manakah yang dapat diambil sebagai teladan? Telah menggurita krisis keteladanan di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara (Syahnakri, 2004). Departemen Agama yang sudah jelas-jelas gagal mengelola haji, dan departemannya merupakan departemen terkorp (di samping Depkes dan Depdiknas), misalnya, tidak juga membuat Menteri Agama merasa bersalah (*Jawa Pos*, 4/1/04). Ketika rakyat dibelit kemelaratan, pengangguran, PHK, bencana alam, dan kerusuhan, para anggota DPRD malah meminta pesangon Rp120.000.000/anggota (*Jawa Pos*, 26/12/2003; *Kompas*, 20/12/2003). Pada saat yang sama BNI dibobol Rp1,7 triliun serta BRI dikuras Rp294 miliar (*Kompas*, 11/12/2003). Tentu saja, pelakunya bukan buruh tani, penarik becak, babu, buruh pabrik, guru ngaji, ... bukan semua itu. Di Indonesia, mencari pejabat dan politisi yang sanggup memberi teladan panutan sesulit semusykil mencari jarum jatuh di tumpukan jerami.

Aktor pelaku korupsi bukan sembarang orang. Para kleptokrat tersebut adalah orang pintar—termasuk pintar membohongi publik, pintar memanipulasi data laporan, pintar menggelembungkan (*mark up*) dana pembangunan, pintar memanfaatkan kedudukan jabatannya untuk kepentingan saku pribadi, keluarga, dan teman-teman separtai. Malahan, mereka juga amat pintar berkelit dan meloloskan diri dari jerat pasal-pasal ompong KUHP (*Jawa Pos*, 30/9/2003; *Kompas*, 11/12/2003). *KUHP* itu, di mata mereka dalam praktik sehari-hari, adalah “Kasih Uang Habis Perkara”, *UUD* tak lebih

dari “Ujung-Ujungnya Duit”, dan *HAKIM* ternyata adalah “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang” (Jupriono & Andayani, 2002).

Hal pertama yang harus dipunyai oleh pemimpin—siapa pun orangnya—adalah keteladanan. Di samping keteladanan, ia juga harus sanggup menciptakan kebaikan bersama—jangan memperberat beban rakyat yang hidupnya sudah susah. Menurut Ranggawarsita (2000a), buat apa menjadi penguasa (*pedah apa aneng ngayun*) jika gagal membangun kemakmuran rakyat, jika tidak mampu memberi teladan dan cuma pintar menebar kesalahan (*Adhedher kaluputan*). Pemimpin model begini hanya akan membawa sial bagi bangsa (*Lamun tuwuh dadi kakembang beka*), seperti dalam bait puisi (2). Maka, lebih baik ia mundur saja.

- | | |
|--|---|
| <p>(2) Yen pinikir sayekti
Pedah apa aneng ngayun
Adhedher kaluputan</p> <p>Siniraman banyu lali
Lamun tuwuh dadi kakembang beka</p> | <p>(Bila dipikir benar-benar
apakah gunanya menjadi pemimpin
bila hanya menanam benih
kesalahan
tersiram air yang bikin lupa
kalau tumbuh suburkan bencana)</p> |
|--|---|

Mendapat tuntutan demikian, pejabat dan politisi yang kebanyakan bermental kancil tak pernah kehabisan akal untuk selalu berkelit dan berdalih. Selalu ada dalih untuk sebuah kenistaan: “mundur itu bukan budaya bangsa” atau “mundur bukan penyelesaian terbaik”. Taktik lainnya, mereka segera menciptakan kamufase dan mengalihkan perhatian dan persoalan pada tata krama (*fatsoen*) mengkritik: “mengecam dan menghujat orang bertentangan dengan kepribadian bangsa”—seakan kepribadian itu soal konkret macam tempe penyot.

Seakan-akan Ranggawarsita dapat memprediksi apa yang terjadi pada perilaku politis dan kekuasaan cucu-cicitnya 200 tahun kemudian. Substansi puisi (1) dan (2) sungguh masih aktual dan apresiatif, cepat dapat dirasakan, di saat sekarang. Sebagai karya sastra, puisi tembang Ranggawarsita merepresentasikan realitas zaman, akan tetapi bobot kebenarannya sebagai nilai moral sanggup menembus waktu hingga 2004 sekarang ini. Maka, sastra dapat menjadi penjaga moral dan budi pekerti pada tiap-tiap zamannya, bahkan sepanjang zaman (cf. Sarjono, 2003).

Kepandaian Tanpa Moralitas Akan Membawa Petaka

Dalam benturan moral dan kebutuhan hidup, Ranggawarsita tidak habis mengerti. Kurang apakah Keraton Surakarta? Rajanya pandai, Sri Sunan Paku Buwono IX, (*Ratune ratu utama*), demikian juga perdanamenternya (*Patihe patih linuwih*), didukung oleh punggawa dan pembesar kasultanan serta para prajurit yang juga pandai, bukan orang-orang sembarangan, bukan *kere munggah bale*, yang juga orang baik-baik berpendidikan (*Panekare becik-becik*). Namun demikian, mengapa semua kepandaian itu tidak sanggup memperbaiki nasib bangsa yang sedang tersungkur dalam putaran nasib zaman (*Parandene tan dadi paliyasing Kalabendu*). Mengapa keburukan malah makin menjadi-jadi (*Mandar sangkin andadra*)? Kutipan (3) berikut menggambarkan kebingungan Ranggawarsita sebagai intelektual.

- | | |
|---|--|
| <p>(3) Ratune ratu utama
Patihe patih linuwih</p> | <p>(Rajanya raja utama
Patihnya amat pandai)</p> |
|---|--|

Pra nayaka tyas rahardja	para menteriya bertekad selamat
Panekare becik-becik	para punggawa baik-baik
Parandene tan dadi	namun tidak menjadi
Paliyasing Kalabendu	pencegah Zaman Terkutuk
Mandar sangkin andadra	malah makin parah
Rubeda kang ngreribedi	angkara yang mengganggu
Beda-beda ardane wong sanagara	beraneka angkara orang di seluruh negeri)

Setidaknya terdapat tiga tafsir untuk tembang (3) ini. Mana dari ketiga tafsir yang paling tepat? Semuanya bergantung pada kearifan pembaca. *Pertama*, tembang ini barangkali sekadar merepresentasikan kondisi ironis keraton saat itu: penguasa orang pintar, tetapi nasib bangsa malah terpuruk. Sang Pujangga sengaja tidak mencoba memaparkan faktor penyebabnya. *Kedua*, kemungkinan lainnya, Ranggawarsita justru ingin mengungkapkan hal yang sebaliknya: raja bukan *ratu utama*, melainkan manusia penuh angkaramurka; patihnya bukan *patih linuwih*, melainkan manusia bodoh tanpa kelebihan apa pun; para menteriya tidak mempunyai niat menyelamatkan bangsa (*tyas rahardja*), tetapi malah aktif merongrong keselamatan negara dengan korupsi; para punggawa dan prajurit kerajaan bukan orang baik-baik, melainkan lebih sebagai kumpulan preman berseragam militer. Jika ungkapan divulgarkan, sesungguhnya, Ranggawarsita hendak mengatakan: raja, patih, pembesar, prajurit, adalah orang-orang busuk! *Ketiga*, Ranggawarsita mengakui bahwa raja, patih, menteri, serta punggawa dan prajurit kerajaan adalah orang-orang pilihan dan pintar-pintar. Jika keadaan malah rusak, pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka. Apa itu? Moral! Maka, kemungkinan ketiganya, Ranggawarsita sesungguhnya hendak mengajarkan suatu pesan moral bahwa setinggi apa pun pendidikan dan intelegensi penguasa, jika tidak memiliki integritas moral, segala keunggulan itu tidak berguna, malahan justru membahayakan bangsa.

Jika pesan moral Sang Pujangga ditransfer ke era baru Orde Reformasi, ironi serupa segera dapat ditanyakan: "Kurang apakah bangsa Indonesia ini?" (Kurang ajar!). Jika boleh dideskripsikan, politisi dan pejabat tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia Orde Reformasi ini terdiri atas manusia-manusia pilihan, berpendidikan tinggi, pemberani, orator-orator ulung, figur populer bak selebritis. Presidennya bukan sembarang orang. Berbeda dari Soeharto yang tentara tulen dan tidak sangat jelas siapa orangtua dan sekolahnya, Reformasi memunculkan Habibie yang profesor doktor, Gus Dur yang budayawan kiai haji demokrat humorolog, serta Megawati yang sabar dan anak kandung tokoh besar proklamator Bung Karno. Keunggulan ini masih diperkuat oleh barisan intelektual kampus, kalangan ulama, LSM, yang mengisi pos-pos DPR, DPRD, menteri, irjen, dirjen, gubernur, bupati, dst.

Agenda yang diusung pun sejak awal adalah antitesisnya Orde Baru. Jika Orde Baru dipandang sebagai rezim penuh korupsi, rendahnya supremasi hukum, dan pelanggaran HAM, Orde Reformasi bertekad (1) memberantas korupsi, (2) menegakkan supremasi hukum, dan (3) menjunjung tinggi HAM semua kalangan tanpa pandang bulu. Setiap insan hidup di negeri ini dapat menjawab tepat apakah ketiganya sudah terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari sekarang.

Keadaan tidak makin baik, tetapi malah makin buruk. Di mana-mana merebak anarkisme, pencuri ayam dibakar hidup-hidup sampai *gosong*, sementara koruptor

melenggang lapang dan kleptokrat selamat merambat. Siapa bilang korupsi, kolusi, nepotisme berkurang? Jumlah rakyat melarat makin berlipat, sementara anggota DPRD tak tahu malu menuntut pesangon Rp120 juta. Pembobol BNI, BRI, lolos. Pelanggar HAM berat lepas bebas. Ternyata, seluruh keunggulan Orde Reformasi gagal mewujudkan tiga agenda yang sejak awal dicanangkannya.

Orde Reformasi—orang bilang—orde paling galak menentang korupsi. Akan tetapi, mengapa dana pengembangan SDM sampai Rp1,8 miliar dimanipulasi anggota DPRD sebuah kota (*Kompas*, 9/1/2004)? Mengapa transaksi politik dan uang mewarnai proses penentuan anggota KPU dan daftar calon anggota legislatif? Mengapa anggota dewan malas menghadiri sidang (*Kompas*, 12/1/2004) buat membicarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya? Mengapa anggota KPU pesta mobil baru berharga ratusan juta di saat rakyat hidup sulit (*Jawa Pos*, 8/1/2004)? Jika Orde Reformasi berbeda dari Orde Baru, mengapa aparat tetap memungut biaya siluman kepada perusahaan, sehingga berdampak pada ditekannya terus upah buruh (*Suara Merdeka*, 1/12/2003)? Jika para pejabat tetap melancarkan jurus politik *aji mumpung* seperti orde sebelumnya, lalu di mana bedanya?

Ini betul-betul ironi sebuah orde yang mengklaim diri sebagai orde antikorupsi. Rezim penguasa Reformasi sering berteriak bahwa Orde Baru korupnya bukan kepalang. Apakah Orde Reformasi sudah bersih dari korupsi? Siapa bilang! Di mata rakyat, jangan-jangan, kedua orde “setali tiga uang” sama-sama kleptokrat. Kalau sama saja, Orde Reformasi adalah orde ironis. Seperti rezim Orde Baru, rezim Orde Reformasi selalu gagal menyeret para koruptor ke peradilan yang sesungguhnya. Prosesi pengadilan yang digelar pun sering sandiwara belaka.

Siapa pun Harus Bertahan pada Kebenaran Meski Sekelilingnya Berbuat Angkara

Pesan moral berikutnya dari Ranggawarsita adalah “sebahagia-bahagia orang yang lupa, masih lebih bahagia orang yang ingat dan waspada; siapa pun harus bertahan pada kebenaran meski sekelilingnya berbuat angkara”. Masih tersisakah ruang bagi orang-orang jujur, pejabat yang masih punya nurani? Adakah mereka dibiarkan hidup sekadar sebagai “pajangan” *pseudo*-demokrasi? Harus berlakukah adagium “yang jujur pasti hancur, yang curang justru menang”? Kegaluannya menyaksikan kondisi sosial politik yang terbelit “zaman edan” di Keraton Surakarta dilukiskan Ranggawarsita (2000a) dalam bait ketujuh dalam *Serat Kalatida* (Kamajaya, 1985). Perhatikan kutipan (4):

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (4) | Amenangi jaman edan | (Mengalami hidup di zaman edan |
| | Ewuh aya ing pambudi | serba sulit menentukan sikap |
| | Melu edan nora tahan | ikut menggila tidak tahan |
| | Yen tan melu anglakoni | kalau tidak ikut |
| | Boya keduman melik | tidak mendapat bagian |
| | Kaliren wekasnipun | akhirnya kelaparan |
| | Dilalah karsa Allah | takdir kehendak Tuhan |
| | Begja-begjaning kang lali | sebahagia-bahagiaanya orang lupa |
| | Luwih begja kang eling lawan waspada | Lebih bahagia yang sadar dan waspada) |

Adalah puisi (4) ini yang terbanyak dan tersering dikutip orang, dari para dalang wayang purwo, juru dakwah, hingga tokoh sekaliber Bung Karno, Gus Dur, Franz von Magnis, Simuh, P.J. Zoetmulder, Hamengkubowono, Niels Mulder, pun menyitirnya.

Sejak abad XVIII—XIX di lingkungan Keraton Surakarta tembang *sinom* ini sudah berkumandang. Setiap orang berbicara tentang fenomena kegilaan gaya hidup masyarakat, perilaku boros dan korup para pejabat, ketika kemaksiatan dan keserakahan angkara murka mendapat ruang lebar untuk menebar bencana, sementara keluhuran dan kejujuran terdesak ke tempat paling pinggir, ... saat itulah lazimnya—dan memang pas—orang ingat akan dan mengutip tembang bait ketujuh *Kalatida* ini.

Masih dapat ditemukankah pemimpin yang jujur dan bersih? Banyak pemimpin yang tumpul kepekaan kemanusiaannya. Pengangguran keleleran di mana-mana, angka kriminalitas membubung tinggi di semua kota dan pelosok, jutaan rakyat melarat kelaparan, berbagai bencana kerusuhan memecah belah integrasi nasional, ratusan TKI disiksa majikan di negeri orang, para gadis dan bayi terancam perdagangan manusia (*trafficking in women*), ribuan kepala keluarga tergusur dan diintimidasi preman dan aparat bermental preman, ... mestinya membuat hati penguasa—sebab pasti punya hati dan pastilah bukan dari batu—terketuk untuk berbuat konkret.

Tetapi, sungguh sayang, jangankan berbuat, bersimpati-empati pun tidak. Yang terjadi malahan mereka berebut kursi para caleg, politik dagang sapi dalam kompromi mengisi jabatan, mengajukan dana kunjungan (baca: keluyuran!) ke luar negeri, mengemis-ngemis uang pesangon berlipat-lipat, sementara kinerjanya amat buruk (cf. Sholahudin, 2004; Sholeh, 2004; Teweng, 2004).

Perilaku pejabat dan politisi menyimpang amat jauh dari agenda Reformasi yang diusungnya sejak 1998: pemberantasan KKN. Anggota DPRD Pemkot Surabaya, misalnya, meminta pesangon Rp120 juta/anggota (*Jawa Pos*, 26/12/2003), sementara belanja pakaian dinas saja sudah menggerogoti Rp500 juta (*Kompas*, 13/1/2004). Ada pula sesama anggota dewan berantem karena pemotongan gaji di Malang (*Kompas*, 12/1/2004). Lain lagi di Blitar, wali murid ditarget, subsidi SPP dipotong untuk biaya proyek mercusuar (*Jawa Pos*, 5/1/2004). Di Ambon pascakerusakan pembagian bahan-bahan bangunan bantuan dari pusat disalahgunakan (*Kompas*/1/10/2003), sementara dana kemanusiaan dikorupsi camat di Aceh (*Kompas*, 2/10/2003). Di Kalimantan pejabat *bancaan* dana reboisasi (*Kompas*, 30/9/2003). Aroma nepotisme pada penetapan caleg terciium di Jatim: suami, istri, dan anak sama-sama caleg (*Surya*, 4/1/2004), atau anggota dewan dengan bangga memboyong dua anaknya sebagai caleg (*Jawa Pos*, 11/1/2004).

Betul-betul dilematis hidup di zaman edan, serba gagap dalam proses pembebasan diri dari pengaruh buruk sekeliling (*Amenangi jaman edan, ewuh aya ing pambudi*). Hal ini tentu saja hanya berlaku bagi mereka yang nuraninya masih berfungsi, yang integritas moralnya masih terjaga. Akan ikut-ikutan menyalahgunakan jabatan, dia tidak tega (*Melu edan nora tahan*). Akan tetapi, bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa (*Boya keduman melik*) jika tidak mau melakukan, malahan bisa saja dia disingkirkan dengan berbagai intrik busuk koleganya di departemennya sendiri—padahal dia tumpuan perut anak dan istri. Berlakulah hukum preman: orang jujur harus dilenyapkan sebab membahayakan kedudukan orang-orang lain yang tercela.

Sanggupkah orang jujur bertahan pada prinsip kebenaran yang diyakini di tengah-tengah lingkungan yang culas, curang, tercela, oportunistik, dan busuk? Di tengah keterpurukan nasib dalam kondisi kekurangan dan kekalahan, masih sanggupkah dia konsisten pada prinsip “sebahagia-bahagia orang yang lupa, masih lebih bahagia orang yang ingat dan waspada”? Inilah substansi pesan moral Ranggawarsita dalam *Kalatida*.

Sang moralis senantiasa akan dihadapkan pada situasi dilematis semacam ini: bertahan pada moral tetapi kelaparan ataukah perut kenyang tetapi melanggar moral?

Bagaimanapun banyaknya tumpukan materi, seberapa pun tingginya jabatan, sebesar apa pun banyaknya dukungan orang-orang di lingkaran kekuasaan, ... jika diperoleh melalui manipulasi, KKN, politik dagang sapi, intrik singkir-menyingkirkan kawan, mengkhianati aspirasi rakyat yang memberi kepercayaan kepadanya, kebahagiaan itu semu (*virtual*) belaka. Suatu saat akan datang balasan setimpal. Sebahagia-bahagiaanya orang yang lupa daratan (*Begja-begjaning kang lali*), jika diperoleh dengan cara curang, masih tetap lebih bahagia orang-orang yang serba ingat dosa, hati-hati, memegang janji pada pemilihnya (*Luwih begja kang eling lawan waspada*) (Ranggawarsita, 2000).

Ulama dan Intelektual Harus Tahan dari Godaan Politik

Sang Pujangga mempunyai perhatian besar terhadap golongan orang-orang berilmu, intelektual (*wong alim*), dan golongan pemimpin agama (*ngulama*). Bobol kokohnya gerbang moral masyarakat bergantung kedua kelompok. Pada zamannya, Ranggawarsita menyaksikan kedua kelompok masyarakat ini pun berperilaku buruk penuh kepalsuan jauh dari harapan masyarakatnya. Untuk itu, Ranggawarsita melontarkan kritik keras melalui salah satu bait dalam *Serat Joko Lodhang* (2000c), berikut ini (5).

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (5) Wong alim alim pulasan | (Orang berilmu ilmunya palsu |
| Njaba putih njeru kuning | di luar putih di dalam kuning |
| Ngulama mangsah maksiyat | pemimpin agama melanggar larangan Tuhan |
| Madat madon minum main | madat, main perempuan, mabuk, berjudi |
| Kaji-ikaji ambanting | haji-haji meninggalkan |
| Dulban kethu putih mamprung | sorban kopiah putihnya kabur |
| Wadon nir wadonira | wanita hilang kewanitaannya |
| Prabaweng salaka rukmi, | kena daya pengaruh perak dan emas |
| kabeh-kabeh mung marono tingalira | semua orang hanya mengejar harta) |

Kasunanan Surakarta menyimpan banyak intelektual, orang-orang berilmu, pintar berceramah, tetapi sesungguhnya tindakannya justru jauh dari sikap seorang intelektual, dan seorang ulama (*Wong alim alim pulasan, Njaba putih njeru kuning*). Ranggawarsita (2000c) menyaksikan tidak adanya satu kata dengan perbuatan. Tokoh agama malah berbuat maksiat melanggar larangan Tuhan (*Ngulama mangsah maksiyat ... Kaji-kaji ambanting dulban kethu putih mamprung*). Yang dipikirkan orang hanya kenikmatan duniawi berbentuk hedonisme material (*kabeh-kabeh mung marono tingalira*).

Apakah di zaman Reformasi kondisi ulama dan intelektual seperti zaman Ranggawarsita juga? Walau tidak persis sama, tampaknya, substansi kesaksian Sang Pujangga ini masih cukup aktual hingga sekarang. Tiga departemen terkorup adalah Departemen Agama (Depag), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan Departemen Kesehatan (Depkes) (Asya'arie, 2003). Depag dan Depdiknas adalah departemen yang mengurus moral bangsa, tetapi justru orang-orang yang paham soal agama dan pendidikan inilah oknum-oknum pelaku KKN. Sederet fakta dapat dihadirkan di sini. Badan penyelenggara ibadah haji yang berada di bawah naungan

Depag adalah sarang koruptor puluhan tahun (Hidayati, 2003). Seorang pendeta dari suatu sekte sesat Pondok Nabi di Bandung pandai menyihir ratusan jemaatnya, dengan gebrakan jurus mengumumkan Hari Kiamat (ternyata meleset-set!), hingga para jemaatnya rela mengorbankan harta untuk pendetanya (Nyata, IV November 2003). Dosen bergelar doktor memplagiat skripsi mahasiswa untuk memperoleh dana proyek penelitian, di Universitas Andalas (Kompas, 14/1/2004). Diduga melakukan plagiasi, seorang peneliti dilaporkan polisi (Kompas, 12/1/2004). Contoh masih dapat ditambah.

Jika pintar dan mengerti agama, mengapa mereka malah melakukan korupsi? Pertanyaan ironis ini dapat dijawab secara berkelakar, demikian. Depag itu kumpulan orang-orang pintar, berilmu, soal *thethek bengek* agama. Mereka tahu persis mana yang dosa, mana yang berpahala, mana mulia, mana tercela. Ganjarannya apa, proses pengadilan hari akhir, dia tahu. Kalau begitu, mengapa korupsi juga? Jangan lupa, di samping paham perbuatan mana yang dosa, mereka juga tahu bagaimana mengurangi dosa, memperkecil hukuman, bahkan bagaimana membebaskan diri dari dosa—setidaknya dipaksakan untuk diyakini sebagai penghibur dan justifikasi diri. Justru, karena itulah, mereka tidak takut melakukan dosa. Jawaban ini memang *guyon*, tetapi *guyon-guyon parikeno*.

Bahwa di masyarakat ada sekelompok orang yang berpandangan dosa akibat korupsi ratusan miliar dapat dihapus dengan perbuatan baik, misalnya menyantuni fakir miskin, mendirikan pondok pesantren, berkali-kali naik haji—sungguh tidak perlu diragukan. Maka, tidak sedikit sang tersangka korupsi tetap bercokol pada jabatannya, malahan tetap memimpin lembaga prestisius kenegaraan. Maka, banyak pejabat koruptor rajin berkunjung ke pesantren, berpelukan dengan pak kiai, bahkan para santri—lucunya—berebut mencium tangan koruptor pejabat tersebut. *Wong alim alim pulasan, Njaba putih njeru kuning*, begitulah sindiran metaforik Ranggawarsita.

KESIMPULAN

Walaupun kritik sosial berbentuk puisi *tembang mocopat* Ranggawarsita terhadap perilaku koruptif pejabat Keraton Solo dilancarkan pada abad XIX, substansinya tetap aktual untuk diberdayakan kembali di saat Indonesia memasuki Orde Reformasi karena orde ini pun syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan interpretasi terhadap puisi-puisi *tembang mocopat* Ranggawarsita, yang telah dibentangkan di muka, dapat diformulasikan beberapa pesan moral Sang Pujangga sbb.: (1) tiadanya teladan perilaku pemimpin mengakibatkan rusaknya negara; (2) kepandaian tanpa moralitas akan membawa petaka; (3) sebahagia-bahagia orang yang lupa, masih lebih bahagia orang yang ingat dan waspada; (4) siapa pun harus bertahan pada kebenaran meski sekelilingnya berbuat angkara; (5) ulama dan intelektual harus tahan dari godaan politik.

Perkembangan gerakan menentang korupsi memunculkan “Gerakan Jalan Lurus” yang dikomandani dr. Soelastomo. Layakkah gerakan ini dianggap sebagai pengkritik keadaan sosial saat ini bagai Ranggawarsita di era Reformasi? Jika Indra Piliang, Teten Masduki, Faisal Basrie, dkk. melancarkan himbuan “Gerakan Anti-Korupsi” dan “Jangan Pilih Politisi Busuk”, apakah ini berarti telah lahir Ranggawarsita di zaman Reformasi? Jika akhir 2003 sekelompok mahasiswa dan LSM menggencarkan kampanye “Anti-Politisi Hitam”, apakah berarti roh Ranggawarsita telah gentayangan menyusup ke kalbu para anak bangsa ini? Jika Noercholish Madjid menggerakkan “Membangun Kembali Indonesia Baru” (MKIB), samakah nilai dan efeknya dengan keberanian dan kecerdikan Ranggawarsita?

Tokoh sekaliber Hazim Muzadi dan H. Imam Safi'i Ma'arif, masing-masing sebagai komandan ormas Islam NU dan Muhammadiyah, pun ternyata tidak tinggal diam. Mereka turun gunung menggugah kesadaran umat dengan memfatwakan perlunya kebangkitan bersama akan "Gerakan Anti-Korupsi" dan "Gerakan Hidup Halal". Bangsa ini, kata Kiai Hazim dalam suatu dialog, membutuhkan pemimpin yang kuat, berani berkorban, dan tentu saja bersih, sehingga Indonesia yang jatuh sebagai negara kleptokrasi ini dapat mulai berubah menjadi negara demokrasi (cf. Sparringa et al., 2003). Para pemuka Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu pun mengayunkan langkah yang sama.

Yang jelas, niat mereka amat mulia. Ingat, nilai suatu perbuatan terletak pada niatnya. Hanya, soal berhasil atau gagal, itu soal lain. Pendeknya, perjuangan mereka masih harus diuji oleh sang waktu (cf. Sholahudin, 2004; Sholeh, 2004). Meskipun demikian, bahwa puisi protes macam tembang Ranggawarsita perlu diberi tempat untuk diteriakkan, sungguh masuk akal. Maka, segala gerakan yang memang diniatkan untuk membersihkan Orde Reformasi dari segala borok korupsi para kleptokrat dan maling berdasi—apakah berbentuk puisi, petisi, unjuk rasa damai, pentas drama—rasanya teramat pantas mendapat dukungan semua kalangan di negeri ini.

Daftar Pustaka Acuan

- Amir, H. 1997. *Nilai-nilai Etis dalam Wayang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Asy'arie, M. 2003. "Korupsi, Kebudayaan, dan Politik Kekuasaan". *Kompas*, 13 November: 5.
- Brakel-Papenhuyzen, C. 2004. "The Birth of Jaka Tarub, a Hero from Northern Java". Hal. 22—33 dalam J. Jansen & H.M.J. Maier (eds.), *Epic Adventures*. Gravener Str.: Lit Verlag
- Danziger, M.K. & W.S. Johnson. 1997. *Literary Criticism*. Boston: D.C. Heath and Co.
- Jupriyono, D. & A. Andayani. 2002. "Modus Strategi, Fungsi, Sasaran Singkatan-Akronim Pelesetan Politis dalam Perspektif Sosiolinguistik Kritis". *Wacana Humaniora* 8(8) Oktober: 89—106.
- Kamajaya. 1985. *Lima Karya Pujangga Ranggawarsita*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kleden, I. 2000. "Politik dalam Puisi dan Prosa Indonesia". *Kompas*, 30 Desember: 10.
- Lubis, M. 1992. "Seniman dan Hati Nurani Sosia". Hal. 63—65 dalam *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maier, H.M.J. 2004. "An Epic that Never Was an Epic—The Malay *Hikayat Hang Tuah*". Hal. 112-127 dlm J. Jansen & H.M.J. Maier (eds.), *Epic Adventures*. Gravener Str.: Lit Verlag.
- Mohamad, G. 1996. "Sastra 'Pasemon': Pergumulan Bawah Sadar Bahasa dan Kuasa". Hal. 307—317 dlm Y. Latif & I.S. Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Pater, W. 1997. "The Renaissance". *The Norton Anthology of English Literature Vol. II*. M.H. Abrams (ed.). New York: Norton & Co.
- Raggawarsita. 2000. "Serat Kalatida". <http://www.jawapalace.org/ronggowarsito2.htm>
- Raggawarsita. 2000a. "Serat Joko Lodang". <http://www.jawapalace.org/ronggowarsito2.htm>
- Ras, J.J. 1985. *Javanese Literature Since Independence: An Anthology*. Seri 88 Verhandelingen. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).
- Richards, I.A. 1993. *Principles of Literary Criticism*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Sarjono, A.R. 2003. "Sastra sebagai Sarana Menggugah Budi Pekerti". <http://www.bahasa-sastra.web.id/agus.asp>
- Sholahudin, U. 2004. "Politik Aji Mumpung Anggota DPRD". *Kompas* Jatim, 13 Januari: H.
- Sholeh, M.S. 2004. "Budaya Malu Anggota DPRD". *Kompas* edisi Jatim, 14 Januari: H.

- Sparringa, D. et al. 2003. *Bangsa yang Berdarah: Jawa Timur dan Potensi Konflik 2004*. Yogyakarta: Mata Bangsa & LP3 Jatim
- Sweeney, A. 2004. "Demise and Reemergence of "Hikayat Seri Rama": The Epic Adventures of A Non Epic". Hal. 140—170 dalam J. Jansen & H.M.J. Maier (eds.), *Epic Adventures*. Munster, Gravener Str.: Lit Verlag.
- Syahnakri, K. 2004. "Krisis Kenegarawanan dan Keteladanan". *Kompas*, 7 Januari: 4.
- Tamba, A.M.P. 2002. "Tawaran Dusta dalam Sastra". <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/19/dikbud/tawa33.htm>
- Teweng, T. 2004. "Penerima "Uang Pesangon" Termasuk Politisi Busuk?" *Kompas* Jatim, 7 Januari: H.
- Toer, P.A. 2002. "Literature, Censorship, and The State: How Dangerous Are Stories?". <http://basis.data.espssoft.net/1995/09/12/0021.html>